

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Transparansi Laporan Keuangan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Transparansi Laporan Keuangan**

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Ada beberapa pengertian tentang transparansi publik yaitu :

Standar Akuntansi Pemerintahan (2015:22) menyatakan bahwa transparansi adalah sebagai berikut :

“Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.

Menurut Andrianto (2015) menyatakan bahwa transparansi adalah sebagai berikut:

“keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.”

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut (Muhammad Iqbal, 2016).

#### **2.1.1.2 Indikator Transparansi Laporan Keuangan**

Menurut Bahtiar (2014:135) ciri-ciri Transparansi yang baik adalah sebagai berikut :

1. kejelasan dari peranan dan tanggung jawab sector pemerinatahan harus dengan jelas dibedakan dari bagian bagian yang lain dengan baik
2. tersedianya informasi public harus di sediakan dengan lengkap mengenai aktivitas keuagan pemerintah masalalu,atau sekarang dan yang akan di proyeksikan
3. keterbukaan dalam penyusunan,pelaksanaan dan pelaporan dianggarkan
4. di peroleh kapasitas yang independen atas intregitas

Dapat penulis simpulkan bahwa ciri-ciri dari transparansi yang baik adalah transparansi dilakukan secara menyeluruh, teersedia informasi publik kepada publik harus di sediakan dengan lengkap, keterbukaan dalam penyusunan. Pelaksanaan dan pelaporan dianggarkan, diperolehnya kepastian yang independen atas integritas, dana adanya perbedaan peranan dan tanggung jawab sektor pemerintah.

Selanjutnya adalah langkah langkah untuk mengimplementasikan transparansi agar menjadi efektif dalam pelaksanaannya, sebagai berikut:

1. Menunjukkan apakah sumber-sumber yang diperoleh sesuai dengan anggaran-anggaran yang legal dan menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Menunjukkan sumber-sumber, alokasi dan penggunaan sumber-sumber serta status dari sumber anggaran.
3. Menunjukkan bagaimana pemerintah atau unit-unitnya membelanjakan aktifitasnya dan memenuhi kewajiban dan komitmennya.
4. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi pemerintah atau unit-unitnya untuk membelanjai aktivitasnya dsn memenuhi kewajiban serta komitmen.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi keuangan pemerintah, untuk menetapkan apakah posisi keuangan pemerintah membaik atau memburuk.
6. Menyediakan informasi untuk menetapkan apakah operasi pemerintah telah memberikan kontribusi kepada masyarakat sekarang dan masa depan.
7. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi kinerja unit-unit pemerintah dalam ukuran biaya pelayanan, efesiensi dan pencapaian aktivitas.

8. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintah atas asset dan kewajibannya.
9. Mengungkapkan kontraktual atas sumber-sumber dan resiko kehilangan potensial dari sumber-sumber yang sudah ada.
10. Menyediakan informasi untuk dapat memahami sifat, cakupan dan luasnya keuangan pemerintah dalam hubungan keseluruhan ekonomi.

Dapat penulis simpulkan bahwa langkah-langkah dalam meimplementasikan transparansi berawal dari sumber-sumber diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang legal dan menunjukkan ketaatan terhadap ketekunan peraturan perundang-undangan, dan menyediakan informasi untuk dapat memahami sifat cangkup dan luasnya aktivitas keuangan pemerintah dalam hubungan keseluruhan ekonomi. Selanjutnya langkah-langkah implementasi transparansi ini menjadi indicator dalam mengukur transparansi laporan keuangan pemerintah.

## **2.1.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah**

### **2.1.2.1 Pengertian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah**

Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP). PSAP merupakan SAP yang diberi nomor, judul, isi, dan tanggal berlaku. Berikut ini beberapa pengertian standar akuntansi pemerintah Dadang Suwanda (2015:8) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Selanjutnya Indra Bastian (2010:138) pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Hal senada dikatakan Baldric Siregar (2015:72) bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan dalam menyusun penyajian laporan keuangan pemerintah

#### **2.1.2.2 Indikator Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah**

Baldric Siregar (2015:79), Abdul Hafiz Tanjung (2015:82), Erlina (2015:11) dan PP No 71 Tahun 2010 terdapat pada PSAP 11, pernyataan standar akuntansi pemerintah sebagai berikut :

a) PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi

Isi dari PSAP 11 mengenai penyajian laporan keuangan konsolidasi.

Laporan keuangan yang disusun entitas akuntansi meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Laporan Operasional
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas
- 4) Neraca

## 5) Catatan Atas Laporan Keuangan

### **2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Dwi Prastowo (2015:5) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Dadang Suwanda (2015:71) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah ukuran-ukuran normatif (aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku) yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi untuk memenuhi tujuan yaitu sebagai pengambilan keputusan.

Maka berdasarkan pengertian di atas, bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah ukuran-ukuran normatif (aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku) atau ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan.

#### **2.1.3.2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Dwi Prastowo (2015:5) dan Dadang Suwanda (2015:71) tempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif atau ciri khas yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan

#### 4. Dapat dipahami

Adapun Penjelasan dari keempat indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut :

##### 1. Relevan.

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu.

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap.

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi

pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

## 2. Andal.

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

### a. Penyajian jujur.

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan tanpa pengecualian.

### b. Dapat diverifikasi (*verifiability*).

Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

### c. Netralitas.

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

## 3. Dapat dibandingkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Bedasarkan dari pemaparan diatas, dapat dsimpulkan indikator dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap semua informasi terkait seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal, informasi social, ekonomi dan politik yang andal dan berkala haruslah tersedia dan di akses oleh publik (biasanya memalui filter media masa yang bertanggung jawab).artinya,transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai di sediakan untuk di pahami dan untuk kemudian di pantau (azri akmal,2015).

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi Mardiasmo (2016:30).

Sedangkan menurut Nikhildey (2011) Transparansi adalah sebagai akses info bagi warga untuk memperoleh informasi tentang masa sekarang, masa lalu dan masa depan kegiatan Negara. Unkapan “kebebasan informasi” Juga banyak di gunakan ketika mengacu kemampuan individu untuk mendapatkan akses informasi dalam kepemilikan Negara.

Nuramalia dan Acmad Fauzi (2017:180) Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa andal sistem akuntansi yang didalamnya mengandung Transparansi laporan keuangan yang memadai, Transparansi laporan keuangauntuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai melalui keandalan laporan keuangan.

Mahmudi (2016:251), menyatakan Transparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (SKPD) Bandung barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Tuti Herawati (2014), menyatakan bahwa, Transparansi laporan keuangan yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Cianjur.

Penelitian yang dilakukan oleh Oka Reza Aditya dan Welly (2017), menyatakan hubungan yang kuat dan positif, dan terdapat pengaruh antara terhadap laporan keuangan daerah, maka dari itu Transparansi laporan keuangan berpengaruh positif terhadap laporan keuangan di Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah di Sukabumi.

### **2.2.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Ahyani (2007:60) mengatakan bahwa, Penerapan SAP berbasis akrual memberikan hasil yang lebih baik dan memberikan keuntungan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah

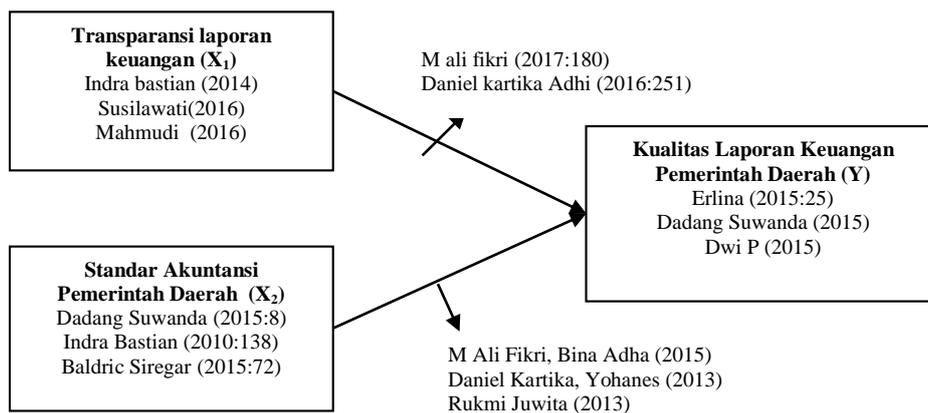
daerah.

Berdasarkan pemaparan diatas tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan basis akuntansi akrual sangat berpengaruh dan hasilnya lebih terpercaya pada penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam penelitian sebelumnya dikatakan Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013) bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal senada juga dikatakan dalam penelitian sebelumnya menurut M.Ali Fikri dan kawan-kawan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyusun skema paradigma penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2. 1**  
**Padigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:96) :

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>1</sub>** : Terdapat pengaruh Transparansi laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**H<sub>2</sub>** : Terdapat pengaruh Pengelolaan keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.